

KEBIJAKAN PUBLIK DAN KEPENTINGAN ELITE: SIAPA MENENTUKAN ARAH EKONOMI?

By: Rudy C Tarumingkeng



KEBIJAKAN PUBLIK
keputusan negara untuk
kepentingan umum



ELITE POLITIK
kekuasaan, koalisi,
agenda kebijakan



ELITE EKONOMI
modal, investasi,
pengaruh pasar



BIROKRASI & TEKNOKRAT
analisis, regulasi,
implementasi



ANGGARAN & REGULASI
APBN, insentif,
perizinan



MEDIA & OPINI
narasi, wacana,
persepsi publik



**RISK OF POLICY
CAPTURE**

kebijakan dapat
menyimpang dari
kepentingan umum



**KEPENTINGAN
PUBLIK**

kesejahteraan,
keadilan,
keberlanjutan



**DEMOKRASI
EKONOMI**

partisipasi,
akuntabilitas,
transparansi

ARAH EKONOMI

Pertumbuhan
Pemerataan
Daya Saing
Stabilitas

HASIL AKHIR DITENTUKAN OLEH PILIHAN KITA BERSAMA



PERTUMBUHAN

ekonomi yang inklusif
dan berkelanjutan



PEMERATAAN

distribusi yang adil,
kesempatan setara



DAYA SAING

inovasi, produktivitas,
dan nilai tambah



AKUNTABILITAS

tata kelola yang baik,
bertanggung jawab



KESEJAHTERAAN

hidup layak, aman,
dan bermartabat

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyclt75@gmail.com

21 Juni 2026

KEBIJAKAN PUBLIK DAN KEPENTINGAN ELITE: SIAPA MENENTUKAN ARAH EKONOMI?

Abstrak

Artikel ini membahas hubungan antara kebijakan publik, kepentingan elite, dan arah pembangunan ekonomi dalam konteks Indonesia serta dinamika global kontemporer. Dalam teori demokrasi, kebijakan publik seharusnya menjadi hasil dari deliberasi rasional antara negara dan warga negara untuk mencapai kepentingan umum. Namun dalam praktik ekonomi-politik, arah kebijakan sering kali ditentukan oleh konfigurasi kekuasaan antara pemerintah, partai politik, birokrasi, pelaku usaha besar, kelompok kepentingan, lembaga internasional, media, dan aktor masyarakat sipil. Karena itu, pertanyaan "siapa menentukan arah ekonomi?" tidak dapat dijawab hanya dengan menunjuk pemerintah formal. Kebijakan ekonomi merupakan hasil negosiasi, kontestasi, kompromi, bahkan kadang-kadang dominasi oleh kelompok yang memiliki sumber daya politik, ekonomi, informasi, dan jaringan kelembagaan.

OECD mendefinisikan *policy capture* sebagai keadaan ketika keputusan publik secara berulang diarahkan menjauh dari kepentingan umum menuju kepentingan khusus; kondisi ini dapat memperburuk ketimpangan, melemahkan demokrasi, menurunkan pertumbuhan, dan merusak kepercayaan publik. ([OECD](#)) Dalam konteks Indonesia, isu ini menjadi semakin relevan karena pembangunan ekonomi 2026 berada dalam tekanan simultan: kebutuhan menjaga pertumbuhan, kredibilitas fiskal, subsidi energi, program sosial besar, investasi strategis, tata kelola BUMN, dan pembentukan lembaga investasi negara seperti Danantara. IMF menekankan pentingnya menjaga kredibilitas fiskal, menghindari aktivitas *quasi-fiscal* yang tidak transparan, serta memperkuat tata kelola dan

akuntabilitas Danantara agar tidak menimbulkan risiko jangka panjang.
([IMF eLibrary](#))

Artikel ini berargumen bahwa elite tidak selalu harus dipandang secara negatif. Dalam sejarah pembangunan, elite politik, birokrasi, teknokrat, dan bisnis dapat berperan sebagai penggerak transformasi bila mereka terikat oleh institusi yang akuntabel, aturan main yang adil, dan orientasi kepentingan publik. Masalah muncul ketika elite menggunakan akses kebijakan untuk mempertahankan rente, menghambat kompetisi, mengalihkan beban kepada publik, atau menutup ruang partisipasi. Karena itu, tantangan utama bukan sekadar “menghapus elite”, melainkan membangun sistem kebijakan publik yang mampu mengubah kekuasaan elite menjadi tanggung jawab publik. Artikel ini menyimpulkan bahwa arah ekonomi yang sehat harus ditentukan melalui keseimbangan antara kepemimpinan negara, kompetensi teknokratik, partisipasi publik, kontrol demokratis, transparansi data, dan disiplin institusional.

Kata kunci: *kebijakan publik, kepentingan elite, ekonomi politik, policy capture, oligarki, regulasi, tata kelola, demokrasi ekonomi, Indonesia, pembangunan.*

1. Pendahuluan

Dalam setiap negara modern, kebijakan publik merupakan instrumen utama untuk menentukan arah ekonomi. Melalui kebijakan fiskal, negara memutuskan siapa yang menerima manfaat belanja publik dan siapa yang menanggung beban pajak. Melalui kebijakan moneter, negara menjaga stabilitas harga, nilai tukar, dan biaya modal. Melalui regulasi, negara menentukan siapa yang boleh masuk pasar, bagaimana persaingan dijalankan, sektor mana yang diprioritaskan, dan standar apa yang harus dipatuhi. Melalui kebijakan industri, negara memilih sektor strategis yang perlu didukung. Melalui perizinan, subsidi, insentif, pengadaan publik, dan

investasi negara, pemerintah secara langsung membentuk struktur ekonomi nasional.

Namun kebijakan publik tidak pernah lahir di ruang kosong. Ia lahir dalam medan kekuasaan. Di balik setiap kebijakan selalu terdapat pertanyaan: siapa yang memperoleh keuntungan, siapa yang membayar biaya, siapa yang diberi akses, siapa yang dibatasi, siapa yang didengar, dan siapa yang diabaikan. Karena itu, kebijakan publik selalu memiliki dimensi ekonomi-politik.

Dalam teori normatif, kebijakan publik seharusnya diarahkan kepada *public interest* atau kepentingan umum. Artinya, kebijakan dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki efisiensi ekonomi, mengurangi ketimpangan, melindungi kelompok rentan, menjaga keberlanjutan, dan memperkuat keadilan sosial. Namun dalam praktiknya, kepentingan umum sering berkompetisi dengan kepentingan khusus. Kelompok yang memiliki modal ekonomi, jaringan politik, akses informasi, kedekatan dengan birokrasi, dan kemampuan membentuk opini publik biasanya lebih mampu memengaruhi arah kebijakan dibanding masyarakat umum.

Inilah pokok persoalan yang dibahas dalam artikel ini: **apakah arah ekonomi ditentukan oleh kepentingan publik atau oleh kepentingan elite?**

Pertanyaan ini sangat relevan bagi Indonesia. Setelah reformasi 1998, Indonesia mengalami demokratisasi politik, desentralisasi, kebebasan pers, pemilihan langsung, dan pembukaan ruang masyarakat sipil. Akan tetapi, banyak peneliti ekonomi-politik mencatat bahwa reformasi formal tidak serta-merta menghapus kekuatan oligarki, patronase, dan rente. Demokrasi dapat berjalan secara elektoral, tetapi struktur kekuasaan ekonomi tetap terkonsentrasi. Pemilu dapat kompetitif, tetapi pembiayaan politik tetap mahal. Regulasi dapat dibuat secara legal, tetapi prosesnya dapat dipengaruhi kelompok berkepentingan. Pasar dapat disebut terbuka, tetapi akses terhadap izin, tanah, proyek, kredit, dan sumber daya publik tidak selalu merata.

Di tingkat global, persoalan ini juga tampak jelas. Amerika Serikat menghadapi perdebatan mengenai pengaruh lobi korporasi, pembiayaan kampanye, dan industri keuangan terhadap kebijakan publik. Uni Eropa berhadapan dengan tantangan regulasi platform digital, energi, pertanian, dan industri strategis. Cina menunjukkan model negara kuat yang mengarahkan kapital dan industri melalui partai-negara. Negara-negara berkembang menghadapi tekanan lembaga keuangan internasional, investor global, utang, komoditas, dan geopolitik. Dengan kata lain, kebijakan publik di mana pun selalu berada dalam tarik-menarik antara kepentingan warga, negara, pasar, elite, dan kekuatan eksternal.

Indonesia pada 2026 menghadapi situasi yang semakin kompleks. OECD memproyeksikan pertumbuhan riil Indonesia sekitar 4,7% pada 2026 dan 5,0% pada 2027, dengan tekanan dari biaya energi, ketidakpastian kebijakan, pelemahan pasar tenaga kerja, serta risiko terhadap konsumsi dan investasi. ([OECD](#)) Pada saat yang sama, pemerintah harus mengelola program sosial besar, subsidi energi, reformasi fiskal, investasi strategis, hilirisasi, BUMN, Danantara, dan transformasi produktivitas. World Bank menempatkan laporan *Indonesia Economic Prospects* Juni 2026 dalam tema "Managing Risks, Unlocking Productivity", yang menunjukkan bahwa agenda ekonomi Indonesia tidak hanya soal menjaga pertumbuhan, tetapi juga mengelola risiko dan membuka produktivitas. ([World Bank](#))

Karena itu, artikel ini tidak hanya membahas teori elite secara abstrak. Artikel ini menghubungkan teori tersebut dengan pertanyaan praktis: bagaimana kebijakan ekonomi dibentuk, siapa aktor yang paling berpengaruh, apa risiko bila kebijakan dikuasai kepentingan sempit, dan bagaimana membangun kebijakan publik yang lebih inklusif.

2. Kebijakan Publik sebagai Arena Kekuasaan

Kebijakan publik sering didefinisikan sebagai apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi ini tampak sederhana, tetapi mengandung makna mendalam. Ketika pemerintah membangun jalan,

menaikkan pajak, memberi subsidi, menghapus izin, membentuk BUMN, mengatur tambang, menetapkan upah minimum, atau membuka investasi asing, semua itu adalah kebijakan. Namun ketika pemerintah tidak mengatur monopoli, tidak menindak pencemaran, tidak mengoreksi ketimpangan, atau tidak membuka data publik, itu juga kebijakan. Dalam ekonomi-politik, *non-decision* sering sama pentingnya dengan keputusan.

Kebijakan publik memiliki tiga lapisan.

Pertama, **lapisan teknokratis**. Di sini kebijakan dipandang sebagai persoalan rasional: data dikumpulkan, masalah dirumuskan, alternatif disusun, biaya dan manfaat dihitung, lalu keputusan dibuat berdasarkan analisis. Ini adalah ideal kebijakan berbasis bukti.

Kedua, **lapisan institusional**. Kebijakan tidak hanya ditentukan oleh data, tetapi juga oleh aturan main: konstitusi, undang-undang, kewenangan lembaga, prosedur anggaran, sistem perizinan, sistem pengadaan, mekanisme audit, peradilan, dan hubungan pusat-daerah.

Ketiga, **lapisan politik**. Kebijakan adalah hasil kontestasi kepentingan. Setiap aktor berusaha memengaruhi isi kebijakan sesuai preferensinya. Pengusaha ingin kepastian dan insentif. Buruh ingin upah dan perlindungan. Konsumen ingin harga murah. Pemerintah ingin pertumbuhan dan stabilitas. Partai ingin dukungan elektoral. Birokrasi ingin kewenangan dan anggaran. Masyarakat sipil ingin keadilan dan akuntabilitas. Investor ingin imbal hasil dan risiko rendah.

Masalah muncul ketika lapisan politik mendominasi lapisan teknokratis dan institusional. Dalam keadaan demikian, kebijakan tidak lagi ditentukan oleh bukti, kebutuhan publik, atau prinsip keadilan, tetapi oleh kemampuan kelompok tertentu untuk memengaruhi proses kebijakan. Inilah yang disebut *policy capture*.

OECD menekankan bahwa *policy capture* bukan hanya korupsi dalam arti suap langsung. Ia dapat terjadi melalui akses tidak seimbang, lobi tertutup, konflik kepentingan, pembiayaan politik, pengaruh informal, pintu putar antara pejabat dan pelaku usaha, serta kelemahan transparansi. OECD juga

menyarankan empat strategi pencegahan: melibatkan pemangku kepentingan yang beragam, memastikan transparansi dan akses informasi, memperkuat akuntabilitas, serta mengidentifikasi risiko *capture* melalui kebijakan integritas organisasi. ([OECD](#))

Dengan demikian, kebijakan publik adalah arena. Pertarungan utama dalam arena itu bukan sekadar antara negara dan pasar, tetapi antara berbagai kelompok yang ingin menjadikan negara sebagai instrumen kepentingannya. Negara dapat menjadi pelindung publik, tetapi juga dapat menjadi alat elite. Negara dapat memperbaiki pasar, tetapi juga dapat menciptakan rente. Negara dapat membangun kesejahteraan, tetapi juga dapat mendistribusikan privilese.

3. Siapa Itu Elite?

Istilah “elite” sering digunakan secara negatif, tetapi secara akademik perlu didefinisikan secara lebih hati-hati. Elite adalah kelompok kecil dalam masyarakat yang memiliki kapasitas lebih besar daripada warga biasa untuk memengaruhi keputusan kolektif. Kapasitas itu dapat berasal dari kekayaan, jabatan politik, posisi birokrasi, kepemilikan media, kontrol atas organisasi, otoritas keagamaan, keahlian teknokratis, kepemimpinan militer, jaringan internasional, atau kekuatan simbolik.

Dalam konteks kebijakan ekonomi, elite dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis.

Pertama, **elite politik**, yaitu presiden, menteri, anggota parlemen, pimpinan partai, kepala daerah, dan aktor politik yang memiliki kewenangan formal menentukan kebijakan.

Kedua, **elite birokrasi dan teknokrat**, yaitu pejabat senior, perencana pembangunan, regulator, bank sentral, otoritas keuangan, dan aparat administrasi yang memiliki kemampuan teknis serta kontrol atas proses kebijakan.

Ketiga, **elite ekonomi**, yaitu pemilik konglomerasi, pelaku usaha besar, bankir, investor, pengelola aset, asosiasi bisnis, dan kelompok industri yang memiliki modal besar.

Keempat, **elite pengetahuan**, yaitu akademisi, konsultan, lembaga riset, ahli hukum, ekonom, dan pakar kebijakan yang dapat membentuk kerangka berpikir pengambil keputusan.

Kelima, **elite media dan digital**, yaitu pemilik media, platform digital, pembentuk opini, dan pengendali infrastruktur informasi yang dapat memengaruhi persepsi publik.

Keenam, **elite global**, yaitu lembaga keuangan internasional, negara donor, perusahaan multinasional, lembaga pemeringkat, investor portofolio, dan institusi geopolitik yang dapat memengaruhi pilihan ekonomi suatu negara.

Elite tidak selalu anti-publik. Banyak kebijakan pembangunan berhasil justru karena ada elite yang memiliki visi, kapasitas, dan komitmen. Negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura menunjukkan peran penting elite teknokratik dan birokrasi pembangunan dalam industrialisasi. Masalah muncul ketika elite tidak dikontrol oleh institusi, ketika kepentingan privat menyamar sebagai kepentingan nasional, dan ketika akses kebijakan hanya terbuka bagi kelompok tertentu.

Dengan demikian, persoalan utama bukan keberadaan elite, melainkan **bagaimana elite dikendalikan, diarahkan, dan dipertanggungjawabkan**. Elite yang terikat institusi dapat menjadi motor pembangunan. Elite yang tidak terkendali dapat menjadi sumber ekstraksi.

4. Kerangka Teoretis: Dari Public Choice sampai Policy Capture

Untuk memahami hubungan kebijakan publik dan kepentingan elite, ada beberapa kerangka teori yang penting.

4.1 Public Choice Theory

Teori *public choice* melihat aktor politik dan birokrasi sebagai aktor yang juga memiliki kepentingan sendiri. Pemerintah tidak selalu diasumsikan sebagai pelayan publik yang netral. Politisi ingin dipilih kembali. Birokrasi ingin mempertahankan anggaran dan kewenangan. Kelompok kepentingan ingin memperoleh regulasi yang menguntungkan. Pemilih ingin manfaat, tetapi sering kekurangan informasi.

Dalam perspektif ini, kebijakan publik dapat menyimpang dari kepentingan umum karena insentif politik tidak selalu sejalan dengan efisiensi sosial. Misalnya, subsidi yang tidak tepat sasaran dapat dipertahankan karena populer secara politik. Proteksi industri dapat diberikan karena industri tersebut memiliki lobi kuat. Proyek infrastruktur dapat dipilih karena nilai politiknya besar, walaupun manfaat ekonominya rendah.

4.2 Regulatory Capture

George Stigler dalam teori regulasi ekonomi menunjukkan bahwa regulasi sering kali "diminta" dan "dibentuk" oleh industri yang diatur, bukan semata-mata oleh kepentingan publik. Industri memiliki insentif kuat untuk memengaruhi regulator karena keuntungan yang diperoleh terkonsentrasi, sementara biaya regulasi tersebar luas kepada masyarakat. Peltzman kemudian mengembangkan teori ini dengan menunjukkan bahwa regulator merespons beberapa kelompok sekaligus, tetapi kelompok yang lebih terorganisasi biasanya lebih berpengaruh.

Dalam konteks Indonesia, risiko *regulatory capture* dapat muncul dalam sektor pertambangan, energi, kehutanan, infrastruktur, keuangan, pangan, digital, kesehatan, dan pendidikan. Ketika kelompok industri memiliki akses lebih besar terhadap pembuat kebijakan daripada masyarakat terdampak, maka regulasi dapat berubah menjadi alat perlindungan kepentingan tertentu.

4.3 Elite Theory

Teori elite menekankan bahwa dalam semua masyarakat, keputusan penting sering dibuat oleh minoritas yang memiliki kekuasaan. Demokrasi memperluas partisipasi, tetapi tidak selalu menghapus dominasi elite.

Acemoglu dan Robinson menunjukkan bahwa perubahan institusi politik formal tidak otomatis mengubah distribusi kekuasaan nyata; elite dapat menginvestasikan sumber daya dalam kekuasaan *de facto* untuk mempertahankan institusi ekonomi yang menguntungkan mereka. Mereka menyebut kemungkinan “captured democracy”, yaitu demokrasi yang tetap hidup secara formal tetapi memilih institusi ekonomi yang menguntungkan elite. ([American Economic Association](#))

Ini sangat relevan bagi negara demokrasi baru. Pemilu dapat berlangsung, parlemen dapat bekerja, partai dapat berkompetisi, tetapi kebijakan ekonomi tetap dapat bias kepada kelompok kuat bila pembiayaan politik mahal, akses informasi tidak merata, dan kontrol publik lemah.

4.4 Institutional Economics

Ekonomi institusional menekankan bahwa kualitas institusi menentukan kualitas pembangunan. Institusi inklusif memberi akses luas kepada warga untuk berpartisipasi dalam ekonomi, melindungi hak, mendorong inovasi, dan membatasi kesewenang-wenangan elite. Sebaliknya, institusi ekstraktif memusatkan manfaat kepada kelompok sempit, menghambat kompetisi, dan melemahkan produktivitas.

Dalam konteks kebijakan publik, pertanyaan pokoknya adalah: apakah kebijakan memperluas akses ekonomi atau memperkuat privilese? Apakah regulasi membuka kompetisi atau melindungi pemain lama? Apakah anggaran memperbaiki layanan publik atau menjadi alat distribusi politik? Apakah investasi negara membangun produktivitas atau hanya memindahkan rente?

4.5 State Capacity

Tidak semua intervensi negara buruk. Banyak sektor memerlukan negara yang kuat: infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transisi energi, teknologi, pertahanan pangan, dan pemerataan wilayah. Namun negara kuat berbeda dari negara yang sekadar besar. Negara kuat memiliki kapasitas merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengoreksi kebijakan.

Negara besar tetapi lemah hanya memperluas birokrasi, anggaran, dan izin tanpa memperbaiki hasil.

Karena itu, kritik terhadap kepentingan elite tidak boleh jatuh pada kesimpulan bahwa negara harus selalu mundur. Yang dibutuhkan adalah negara yang aktif tetapi akuntabel; negara yang strategis tetapi transparan; negara yang mampu mengarahkan pasar tetapi tidak dikuasai oleh kelompok pasar tertentu.

5. Mekanisme Elite Mempengaruhi Kebijakan Publik

Pengaruh elite terhadap kebijakan jarang terjadi secara tunggal. Ia bekerja melalui banyak jalur.

5.1 Agenda Setting

Tahap paling awal dalam kebijakan adalah menentukan masalah apa yang dianggap penting. Tidak semua masalah publik masuk agenda pemerintah. Masalah yang dialami kelompok miskin, petani kecil, nelayan, pekerja informal, atau masyarakat adat sering kurang terdengar dibanding masalah yang dialami sektor bisnis besar. Bila agenda kebijakan ditentukan oleh elite, maka masalah publik dapat direduksi menjadi masalah pertumbuhan, investasi, dan stabilitas, sementara isu keadilan, lingkungan, hak pekerja, dan distribusi manfaat menjadi sekunder.

5.2 Pembiayaan Politik

Politik modern membutuhkan biaya besar. Kampanye, konsultan, media, survei, mobilisasi, saksi pemilu, dan komunikasi publik membutuhkan dana. Ketika partai politik dan kandidat bergantung pada pendanaan elite ekonomi, maka risiko balas jasa kebijakan meningkat. OECD mencatat bahwa Indonesia memiliki regulasi pembiayaan politik, tetapi praktiknya masih tertinggal; misalnya, kriteria praktik pembiayaan politik yang dipenuhi Indonesia lebih rendah dibanding rata-rata OECD, dan partai politik tidak diwajibkan membuat laporan keuangan tahunan tersedia untuk publik. ([OECD](#))

Pembiayaan politik adalah salah satu pintu utama *policy capture*. Tidak selalu dalam bentuk transaksi ilegal. Kadang ia bekerja melalui harapan, kedekatan, akses, dan hubungan jangka panjang.

5.3 Lobi dan Akses Tidak Seimbang

Lobi adalah bagian normal dari demokrasi, tetapi menjadi problem bila tidak transparan. Kelompok bisnis besar biasanya memiliki staf hukum, konsultan, asosiasi, akses rapat, data, dan kemampuan menyusun naskah kebijakan. Kelompok masyarakat biasa jarang memiliki sumber daya serupa. OECD mencatat bahwa Indonesia memenuhi 40% kriteria regulasi lobi dan hanya 11% kriteria praktik lobi; Indonesia juga disebut belum memiliki regulasi yang mendefinisikan aktivitas lobi dan pelobi, belum memiliki badan pengawas lobi di pemerintah pusat, serta belum memiliki alat registrasi lobi yang mudah diakses. ([OECD](#))

Tanpa transparansi lobi, publik sulit mengetahui siapa bertemu siapa, membahas apa, dan bagaimana masukan tertentu masuk ke dalam kebijakan.

5.4 Revolving Door

Revolving door terjadi ketika pejabat publik berpindah ke sektor swasta yang sebelumnya mereka atur, atau pelaku sektor swasta masuk ke posisi regulator. Mobilitas ini tidak selalu buruk karena pengalaman sektor swasta dapat memperkaya kebijakan. Namun tanpa aturan konflik kepentingan, ia dapat menimbulkan risiko: pejabat membuat kebijakan yang menguntungkan calon pemberi kerja, regulator terlalu dekat dengan industri, atau perusahaan memperoleh informasi istimewa.

5.5 Penguasaan Data dan Keahlian

Di era modern, kebijakan membutuhkan data. Siapa yang menguasai data sering menguasai narasi kebijakan. Korporasi digital menguasai data perilaku konsumen. Industri energi menguasai data biaya dan pasokan. Pengembang menguasai data pasar properti. Bank menguasai data kredit.

Pemerintah sering bergantung pada data sektor yang diatur. Ketergantungan informasi ini dapat membuat regulator sulit independen.

5.6 Pengaruh Media dan Opini Publik

Elite dapat memengaruhi kebijakan melalui pembentukan opini. Media, lembaga survei, influencer, dan platform digital dapat membentuk persepsi tentang kebijakan tertentu. Sebuah kebijakan dapat dilabeli "pro-investasi", "anti-rakyat", "pro-asing", "nasionalis", atau "populis", tergantung narasi yang dibangun. Dalam masyarakat digital, perang narasi dapat menentukan ruang politik kebijakan.

5.7 Pengadaan dan Proyek Publik

Belanja negara adalah sumber kekuasaan ekonomi. Pengadaan barang dan jasa, proyek infrastruktur, konsesi, izin tambang, pengelolaan pelabuhan, energi, pangan, dan digital dapat menjadi arena perebutan rente. Bila proses tender tidak transparan, spesifikasi diarahkan untuk pemain tertentu, atau pengawasan lemah, maka kebijakan publik berubah menjadi distribusi keuntungan privat.

5.8 Jalur Hukum dan Regulasi

Elite dapat memengaruhi kebijakan melalui penyusunan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, standar teknis, dan keputusan administratif. Kadang perubahan kecil dalam definisi, ambang batas, pengecualian, atau prosedur dapat menghasilkan keuntungan besar bagi kelompok tertentu. Inilah sebabnya analisis kebijakan harus membaca detail regulasi, bukan hanya judul kebijakan.

6. Indonesia: Demokrasi Elektoral dan Tantangan Ekonomi-Politik

Indonesia adalah demokrasi besar dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Namun demokrasi Indonesia beroperasi dalam struktur sosial-ekonomi yang sangat kompleks: wilayah luas, ketimpangan antarwilayah, kekuatan konglomerasi, biaya politik tinggi, peran besar BUMN,

ketergantungan komoditas, desentralisasi, dan birokrasi yang masih terus direformasi.

Sejak reformasi, Indonesia berhasil membangun stabilitas politik relatif, pemilu langsung, kebebasan pers, dan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil. Namun, struktur ekonomi-politik lama tidak hilang sepenuhnya. Hubungan patron-klien, bisnis-politik, rente sumber daya alam, dan pengaruh elite lokal tetap kuat. Desentralisasi membuka ruang demokrasi lokal, tetapi juga membuka ruang oligarki daerah. Pemilihan kepala daerah memperluas partisipasi, tetapi juga meningkatkan biaya politik.

Dalam konteks ekonomi, arah kebijakan Indonesia sering ditentukan oleh kompromi antara beberapa agenda: menjaga pertumbuhan, menarik investasi, menjaga stabilitas sosial, membiayai program kesejahteraan, memperkuat BUMN, mengelola sumber daya alam, menjaga fiskal, dan merespons tekanan global. Tidak ada satu aktor tunggal yang sepenuhnya menentukan arah ekonomi. Namun tidak semua aktor memiliki bobot yang sama.

Presiden dan kabinet memiliki agenda pembangunan. DPR memiliki fungsi legislasi dan anggaran. Birokrasi memiliki kontrol teknis. Bank Indonesia dan otoritas keuangan menjaga stabilitas. Pengusaha besar memengaruhi investasi dan lapangan kerja. Partai politik memengaruhi dukungan kebijakan. Media memengaruhi opini. Lembaga internasional memengaruhi persepsi investor dan kredibilitas makro. Masyarakat sipil mengawasi, tetapi kapasitasnya bervariasi. Rakyat memilih, tetapi partisipasi setelah pemilu sering terbatas.

Kondisi ini membuat kebijakan ekonomi Indonesia sering bergerak dalam pola kompromi: cukup pro-pasar untuk menarik investasi, cukup pro-negara untuk mempertahankan kontrol strategis, cukup populis untuk menjaga legitimasi, dan cukup pragmatis untuk merespons tekanan fiskal. Tantangannya adalah memastikan kompromi tersebut tidak berubah menjadi dominasi kelompok elite.

7. Arena-Arena Utama Perebutan Arah Ekonomi Indonesia

7.1 APBN dan Politik Anggaran

APBN adalah dokumen ekonomi-politik paling penting. Ia menunjukkan prioritas negara secara konkret. Retorika pembangunan dapat berbicara tentang rakyat, tetapi APBN menunjukkan siapa yang benar-benar diprioritaskan. Anggaran pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, subsidi energi, pertahanan, transfer daerah, dan proyek strategis mencerminkan pilihan politik.

Elite memengaruhi APBN melalui pembahasan legislatif, usulan kementerian, proyek daerah, program prioritas, dan tekanan kelompok kepentingan. Risiko muncul ketika anggaran lebih banyak mengikuti kepentingan politik jangka pendek daripada kebutuhan publik jangka panjang. Program yang populer dapat memperoleh alokasi besar meskipun efektivitasnya belum jelas. Sebaliknya, investasi penting seperti kualitas guru, riset, kesehatan preventif, data publik, dan reformasi birokrasi sering kurang terlihat secara politik.

IMF menekankan bahwa menjaga aturan fiskal dan kredibilitas fiskal tetap penting bagi Indonesia, termasuk menghindari kegiatan *quasi-fiscal* dan kewajiban kontinjensi yang dapat memperlebar jejak fiskal tanpa terlihat jelas dalam APBN. ([IMF eLibrary](#)) Ini relevan karena kebijakan publik tidak hanya terjadi di APBN formal, tetapi juga melalui BUMN, badan investasi negara, penugasan, subsidi terselubung, dan jaminan pemerintah.

7.2 Sumber Daya Alam dan Hilirisasi

Sumber daya alam adalah arena klasik ekonomi-politik Indonesia. Tambang, sawit, kehutanan, migas, kelautan, dan energi memiliki nilai ekonomi besar. Kebijakan perizinan, ekspor, pajak, royalti, lingkungan, tata ruang, dan hilirisasi menentukan siapa memperoleh nilai tambah.

Hilirisasi dapat menjadi kebijakan nasional yang sah dan strategis. Indonesia perlu keluar dari ketergantungan ekspor bahan mentah. Namun hilirisasi juga dapat menjadi arena rente bila insentif, izin, dan proteksi

hanya menguntungkan kelompok tertentu. Pertanyaan pentingnya: apakah hilirisasi memperluas kapasitas teknologi nasional, menciptakan pekerjaan berkualitas, memperkuat industri domestik, dan menjaga lingkungan? Ataukah hanya memindahkan rente dari ekspor bahan mentah ke industri pengolahan yang dikuasai segelintir aktor?

7.3 BUMN, Danantara, dan Kapitalisme Negara

BUMN memiliki posisi strategis dalam ekonomi Indonesia. BUMN mengelola energi, perbankan, infrastruktur, telekomunikasi, transportasi, pangan, dan sektor lain. Kehadiran Danantara sebagai badan investasi dan pengelola aset negara memperkuat arah kapitalisme negara baru. Di satu sisi, konsolidasi aset negara dapat meningkatkan efisiensi dan daya investasi. Di sisi lain, konsentrasi aset besar membutuhkan tata kelola luar biasa kuat.

OECD menyatakan bahwa penguatan tata kelola Danantara akan membantu memaksimalkan dampak positif investasinya, sementara penerapan yang cepat dan efektif dapat menarik modal swasta serta mempercepat proyek industri dan infrastruktur berdampak tinggi. ([OECD](#)) Namun tanpa transparansi, Danantara juga dapat menjadi arena baru kepentingan elite: siapa menentukan proyek, siapa menjadi mitra, siapa memperoleh pembiayaan, siapa menanggung risiko, dan siapa menerima manfaat.

7.4 Perizinan, Tata Ruang, dan Investasi

Perizinan adalah pintu masuk kekuasaan ekonomi. Izin tambang, izin perkebunan, izin kawasan industri, izin pembangunan properti, izin impor, izin ekspor, dan izin usaha menentukan akses terhadap peluang ekonomi. Ketika perizinan transparan, sederhana, dan berbasis aturan, ia mendorong investasi. Ketika perizinan tertutup, diskresioner, dan mahal, ia menjadi alat rente.

Reformasi perizinan melalui digitalisasi dapat membantu, tetapi digitalisasi bukan jaminan integritas. Sistem digital masih dapat didesain dengan pengecualian, celah, atau data yang tidak terbuka. Karena itu, reformasi

perizinan harus disertai audit, keterbukaan data, partisipasi publik, dan kepastian hukum.

7.5 Pajak dan Distribusi Beban

Kebijakan pajak menentukan siapa membayar negara. Pajak bukan hanya instrumen fiskal, tetapi juga instrumen keadilan. Bila pajak lebih mudah ditarik dari pekerja formal dan konsumen, sementara kelompok kaya memiliki banyak celah penghindaran pajak, maka beban pembangunan menjadi tidak adil. Bila insentif pajak diberikan kepada investor tanpa evaluasi manfaat, negara kehilangan penerimaan. Bila pajak UMKM terlalu menekan, kewirausahaan kecil melemah.

Elite dapat memengaruhi kebijakan pajak melalui lobi insentif, pembebasan, pengecualian, dan pengaturan tarif. Karena itu, reformasi pajak harus dilihat dari aspek keadilan, bukan hanya target penerimaan.

7.6 Ekonomi Digital dan Data

Ekonomi digital membuka peluang baru, tetapi juga menciptakan bentuk baru kekuasaan elite. Platform digital menguasai data, jaringan, algoritma, dan akses pasar. UMKM bergantung pada platform. Konsumen bergantung pada aplikasi. Pekerja gig bergantung pada algoritma. Pemerintah membutuhkan data platform, tetapi sering tertinggal dari sisi kapasitas regulasi.

Pertanyaannya: apakah kebijakan digital akan memperkuat inovasi dan inklusi, atau menciptakan monopoli baru? Apakah data publik dan privat dikelola untuk kepentingan masyarakat, atau hanya menjadi sumber keuntungan perusahaan besar? Di masa depan, kebijakan data akan menjadi salah satu arena utama ekonomi-politik.

8. Dampak Policy Capture terhadap Ekonomi

Bila kebijakan publik dikuasai kepentingan elite sempit, beberapa dampak serius dapat terjadi.

Pertama, **inefisiensi ekonomi**. Kebijakan yang melindungi pemain lama dapat menghambat kompetisi. Industri menjadi nyaman dengan proteksi, bukan produktivitas. Investasi masuk ke sektor rente, bukan inovasi.

Kedua, **ketimpangan**. Manfaat kebijakan terkonsentrasi pada kelompok yang memiliki akses, sedangkan biaya ditanggung publik melalui pajak, harga lebih tinggi, lingkungan rusak, atau kesempatan ekonomi yang tertutup.

Ketiga, **lemahnya kepercayaan publik**. Ketika masyarakat melihat kebijakan hanya menguntungkan kelompok tertentu, kepercayaan terhadap pemerintah menurun. Kepercayaan adalah modal sosial penting bagi pembangunan. Tanpa kepercayaan, kebijakan baik pun mudah dicurigai.

Keempat, **risiko fiskal**. Kebijakan populis atau proyek elite dapat menciptakan beban anggaran jangka panjang. Risiko ini makin berbahaya bila disembunyikan melalui BUMN, jaminan pemerintah, atau badan investasi negara.

Kelima, **kerusakan lingkungan**. Banyak rente ekonomi berada di sektor berbasis lahan dan sumber daya alam. Bila kebijakan lingkungan dikalahkan oleh kepentingan ekstraktif, kerusakan ekologis menjadi biaya publik.

Keenam, **pelemahan demokrasi**. Demokrasi tidak hanya soal pemilu. Demokrasi membutuhkan kesetaraan akses terhadap proses kebijakan. Bila keputusan penting dibuat dalam ruang tertutup oleh elite, maka demokrasi menjadi prosedural tetapi miskin substansi.

9. Perbandingan Global: Elite dan Arah Ekonomi Dunia

Masalah kepentingan elite bukan hanya persoalan Indonesia. Di Amerika Serikat, perdebatan mengenai lobi korporasi, pembiayaan kampanye, industri farmasi, energi, teknologi, dan keuangan menunjukkan bahwa negara demokrasi maju pun menghadapi risiko dominasi kelompok

berkepentingan. Studi Gilens dan Page menemukan bahwa elite ekonomi dan kelompok kepentingan bisnis memiliki pengaruh independen yang kuat terhadap kebijakan publik di Amerika Serikat, sementara warga rata-rata memiliki pengaruh yang jauh lebih kecil ketika preferensinya berbeda dari elite.

Di Cina, arah ekonomi ditentukan oleh partai-negara melalui kombinasi perencanaan, BUMN, bank negara, kebijakan industri, dan kontrol politik. Model ini dapat menghasilkan mobilisasi investasi cepat, tetapi menghadapi risiko distorsi, utang, kelebihan kapasitas, dan terbatasnya akuntabilitas publik.

Di Uni Eropa, proses kebijakan sangat terlembaga, tetapi tetap menghadapi tekanan lobi dari sektor energi, pertanian, teknologi, keuangan, dan pertahanan. Transparansi lobi menjadi isu penting karena regulasi Uni Eropa memiliki dampak lintas negara.

Di negara-negara berkembang, kebijakan ekonomi sering dipengaruhi oleh kreditor, lembaga pemeringkat, investor global, perusahaan multinasional, dan lembaga internasional. Ini tidak selalu buruk karena standar global dapat mendorong disiplin. Namun bila tekanan eksternal terlalu dominan, ruang kebijakan nasional dapat menyempit.

Dari perbandingan ini, terlihat bahwa pertanyaan "siapa menentukan arah ekonomi?" selalu memiliki jawaban majemuk. Tidak ada negara yang sepenuhnya bebas dari pengaruh elite. Perbedaannya terletak pada kualitas institusi yang mengatur pengaruh tersebut. Negara dengan institusi kuat membuat pengaruh elite menjadi transparan, terbatas, dan dapat diuji. Negara dengan institusi lemah membiarkan pengaruh elite bekerja secara gelap, informal, dan tidak akuntabel.

10. Siapa Sebenarnya Menentukan Arah Ekonomi?

Secara konstitusional, arah ekonomi ditentukan oleh rakyat melalui mekanisme demokrasi: pemilu, perwakilan, hukum, dan kebijakan negara.

Secara administratif, arah ekonomi ditentukan oleh pemerintah melalui perencanaan, anggaran, regulasi, dan program. Secara teknokratis, arah ekonomi dipengaruhi oleh ahli, data, dan lembaga ekonomi. Secara pasar, arah ekonomi dipengaruhi oleh investor, konsumen, teknologi, harga global, dan kompetisi. Secara politik, arah ekonomi dipengaruhi oleh elite, partai, koalisi, kelompok kepentingan, dan opini publik.

Jadi, jawaban yang paling tepat adalah: **arah ekonomi ditentukan oleh konfigurasi kekuasaan antara negara, pasar, elite, warga, dan institusi.**

Dalam konfigurasi yang sehat, pemerintah memimpin arah pembangunan, teknokrat menyediakan analisis, pasar menyediakan inovasi dan efisiensi, masyarakat sipil mengawasi, parlemen mengontrol, media membuka informasi, dan warga memberi mandat. Dalam konfigurasi yang tidak sehat, elite ekonomi membiayai politik, politik membalas dengan kebijakan, birokrasi memberi akses, media membentuk narasi, dan publik hanya menanggung akibat.

Karena itu, pertanyaan penting bukan hanya "siapa menentukan?", tetapi "melalui mekanisme apa, dengan akuntabilitas seperti apa, dan untuk kepentingan siapa?"

11. Menuju Kebijakan Publik yang Lebih Inklusif

Agar kebijakan publik tidak dikuasai kepentingan elite sempit, Indonesia perlu memperkuat beberapa pilar.

11.1 Transparansi Proses Kebijakan

Setiap proses penyusunan kebijakan penting harus memiliki jejak publik: naskah akademik, daftar pemangku kepentingan yang diajak konsultasi, masukan publik, analisis dampak, dan alasan perubahan pasal. Transparansi bukan sekadar mengunggah dokumen, tetapi memungkinkan publik memahami prosesnya.

11.2 Regulasi Lobi

Indonesia perlu memiliki aturan lobi yang jelas: siapa pelobi, siapa yang dilobi, isu apa yang dibahas, dokumen apa yang disampaikan, dan bagaimana konflik kepentingan dicegah. Lobi tidak perlu dilarang, tetapi harus diterangkan.

11.3 Reformasi Pembiayaan Politik

Partai politik perlu pembiayaan yang lebih transparan, realistis, dan diaudit secara terbuka. Tanpa reformasi pembiayaan politik, kebijakan publik akan terus rentan terhadap ketergantungan pada penyandang dana besar.

11.4 Penguatan Analisis Dampak Regulasi

Setiap regulasi ekonomi penting perlu melalui *regulatory impact assessment*. Analisis harus menilai dampak terhadap kompetisi, UMKM, konsumen, lingkungan, fiskal, daerah, dan kelompok rentan.

11.5 Open Data dan Audit Publik

Data anggaran, pengadaan, perizinan, konsesi, subsidi, insentif pajak, dan penerima manfaat harus dibuka sejauh tidak melanggar privasi dan keamanan. Data terbuka memungkinkan akademisi, media, dan masyarakat sipil melakukan pengawasan.

11.6 Penguatan KPK, BPK, Ombudsman, dan Peradilan

Lembaga pengawasan harus independen dan kuat. Tanpa penegakan hukum, transparansi hanya menjadi etalase. Pengawasan juga harus berfokus pada korupsi kebijakan, bukan hanya korupsi administratif.

11.7 Partisipasi Bermakna

Partisipasi publik tidak boleh menjadi formalitas. Kelompok terdampak harus dilibatkan sejak awal, bukan setelah keputusan hampir selesai. Partisipasi harus mencakup buruh, petani, nelayan, UMKM, masyarakat adat, akademisi, perempuan, pemuda, dan kelompok rentan.

11.8 Etika Revolving Door dan Konflik Kepentingan

Pejabat publik perlu tunduk pada aturan konflik kepentingan yang ketat. Masa jeda, deklarasi aset, deklarasi kepentingan, dan larangan menangani perkara yang terkait kepentingan pribadi harus ditegakkan.

11.9 Desain BUMN dan Danantara yang Akuntabel

BUMN dan Danantara harus memiliki pemisahan mandat komersial dan mandat publik. Penugasan negara harus dikompensasi secara jelas. Laporan keuangan, risiko, proyek, dan mitra investasi perlu dibuka secara memadai.

11.10 Pendidikan Kewargaan Ekonomi

Masyarakat perlu memahami bahwa kebijakan ekonomi bukan urusan teknokrat semata. Pajak, subsidi, upah, harga pangan, energi, tanah, pendidikan, dan digitalisasi adalah isu warga. Demokrasi ekonomi membutuhkan warga yang mampu membaca anggaran, regulasi, dan dampak kebijakan.

12. Refleksi Normatif: Kepentingan Publik sebagai Kompas

Kepentingan publik bukan konsep sederhana. Dalam masyarakat majemuk, kepentingan publik selalu diperdebatkan. Pengusaha, pekerja, petani, konsumen, negara, dan generasi mendatang dapat memiliki kepentingan berbeda. Namun, ada beberapa prinsip minimal.

Pertama, kebijakan publik harus memperluas kesempatan, bukan menutup akses. Kedua, kebijakan harus menciptakan nilai sosial yang lebih besar daripada biaya sosialnya. Ketiga, kebijakan harus melindungi kelompok yang tidak memiliki daya tawar kuat. Keempat, kebijakan harus menjaga keberlanjutan fiskal dan ekologis. Kelima, kebijakan harus dapat dijelaskan secara terbuka kepada publik. Keenam, kebijakan harus tunduk pada evaluasi dan koreksi.

Elite boleh berperan, tetapi tidak boleh menentukan semuanya. Pasar boleh bekerja, tetapi tidak boleh dibiarkan mengatur kepentingan publik sendirian. Negara boleh kuat, tetapi tidak boleh tertutup. Rakyat memberi

mandat, tetapi mandat itu harus terus dijaga melalui partisipasi dan pengawasan.

Dalam ekonomi-politik kontemporer, bahaya terbesar bukan hanya korupsi amlop, tetapi korupsi arah: ketika kebijakan legal secara prosedural, tetapi secara substansial membelokkan manfaat publik kepada kelompok sempit. Inilah bentuk korupsi yang paling sulit dilihat karena ia sering hadir dalam bahasa pembangunan, investasi, efisiensi, nasionalisme, atau stabilitas.

13. Kesimpulan

Kebijakan publik adalah medan tempat kepentingan publik dan kepentingan elite bertemu, bernegosiasi, dan bertarung. Dalam teori demokrasi, rakyat menentukan arah ekonomi melalui mandat politik. Dalam praktik ekonomi-politik, arah ekonomi ditentukan oleh konfigurasi kekuasaan yang melibatkan pemerintah, parlemen, birokrasi, teknokrat, pelaku usaha, partai politik, media, investor, lembaga global, masyarakat sipil, dan warga.

Elite tidak selalu buruk. Elite dapat menjadi penggerak pembangunan bila memiliki visi, kompetensi, dan tanggung jawab publik. Namun elite menjadi masalah ketika menguasai akses kebijakan untuk mempertahankan rente, menutup kompetisi, melemahkan pengawasan, atau mengalihkan biaya kepada masyarakat.

Bagi Indonesia, tantangan terbesar adalah membangun negara yang cukup kuat untuk mengarahkan pembangunan, tetapi cukup akuntabel agar tidak dikuasai kepentingan sempit. Indonesia membutuhkan kebijakan industri, investasi strategis, reformasi BUMN, hilirisasi, transformasi digital, dan perlindungan sosial. Namun semua itu harus dijalankan dengan transparansi, partisipasi, integritas, dan evaluasi.

Jadi, siapa yang menentukan arah ekonomi? Jawaban normatifnya: rakyat melalui negara demokratis. Jawaban empirisnya: elite yang memiliki akses terhadap negara sering sangat menentukan. Jawaban reformisnya: arah

ekonomi harus ditentukan melalui institusi publik yang membuat kekuasaan elite dapat diawasi, diuji, dibatasi, dan diarahkan kepada kesejahteraan bersama.

Ekonomi yang sehat bukan ekonomi tanpa elite, melainkan ekonomi yang tidak disandera elite. Demokrasi yang sehat bukan demokrasi tanpa konflik kepentingan, melainkan demokrasi yang mampu membuat konflik kepentingan menjadi terbuka, adil, dan bertanggung jawab. Kebijakan publik yang baik bukan kebijakan yang bebas dari politik, melainkan kebijakan yang membuat politik tunduk pada kepentingan publik.

Glossarium

Akuntabilitas

Kewajiban pejabat, lembaga, atau aktor kebijakan untuk menjelaskan keputusan, menerima pemeriksaan, dan menanggung konsekuensi atas tindakan yang dilakukan.

APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; instrumen utama kebijakan fiskal yang menunjukkan prioritas penerimaan dan pengeluaran negara.

Capture Democracy

Keadaan ketika demokrasi tetap berjalan secara formal, tetapi keputusan ekonomi dan institusi publik lebih banyak menguntungkan elite.

Conflict of Interest

Situasi ketika kepentingan pribadi, keluarga, bisnis, atau kelompok dapat memengaruhi objektivitas pejabat publik dalam mengambil keputusan.

Danantara

Badan pengelola investasi negara Indonesia yang berperan dalam konsolidasi aset dan investasi strategis negara.

Demokrasi Ekonomi

Prinsip bahwa arah ekonomi harus memperluas partisipasi, kesempatan, dan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya kelompok pemilik modal.

Elite

Kelompok kecil yang memiliki sumber daya politik, ekonomi, sosial, informasi, atau simbolik lebih besar untuk memengaruhi keputusan publik.

Elite Ekonomi

Pelaku usaha besar, konglomerat, investor, pemilik modal, asosiasi bisnis, dan aktor ekonomi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan.

Elite Politik

Aktor yang memiliki kewenangan formal atau informal dalam proses politik, seperti presiden, menteri, anggota parlemen, pimpinan partai, dan kepala daerah.

Hilirisasi

Kebijakan meningkatkan nilai tambah komoditas melalui pengolahan lebih lanjut di dalam negeri.

Institusi Ekstraktif

Institusi yang memusatkan kekuasaan dan manfaat ekonomi pada kelompok sempit serta membatasi akses kelompok lain.

Institusi Inklusif

Institusi yang membuka akses luas terhadap hak, kesempatan ekonomi, perlindungan hukum, dan partisipasi publik.

Kebijakan Fiskal

Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pajak, belanja negara, defisit, utang, dan alokasi anggaran.

Kebijakan Publik

Keputusan, tindakan, atau ketidaktindakan pemerintah yang memengaruhi kehidupan masyarakat.

Kepentingan Publik

Kepentingan bersama yang mencakup kesejahteraan, keadilan, efisiensi, keberlanjutan, keamanan, dan hak warga negara.

Kepentingan Khusus

Kepentingan kelompok tertentu yang dapat bertentangan dengan kepentingan masyarakat luas.

Lobi

Upaya aktor tertentu untuk memengaruhi keputusan publik melalui komunikasi, advokasi, data, tekanan politik, atau hubungan langsung dengan pembuat kebijakan.

Oligarki

Konsentrasi kekuasaan ekonomi dan politik pada kelompok kecil yang mampu mempertahankan kepentingannya melalui akses terhadap negara.

Policy Capture

Pembelokan kebijakan publik dari kepentingan umum menuju kepentingan khusus secara berulang atau sistematis.

Public Choice Theory

Pendekatan yang menganalisis proses politik dengan asumsi bahwa politisi, birokrat, pemilih, dan kelompok kepentingan memiliki insentif dan kepentingan sendiri.

Quasi-Fiscal Activity

Aktivitas yang berdampak seperti kebijakan fiskal, tetapi dilakukan di luar APBN formal, misalnya melalui BUMN, badan investasi, atau jaminan pemerintah.

Regulatory Capture

Keadaan ketika regulator yang seharusnya mengatur industri justru dipengaruhi atau dikuasai oleh industri tersebut.

Rente Ekonomi

Keuntungan yang diperoleh bukan karena produktivitas atau inovasi, tetapi karena akses khusus, proteksi, monopoli, izin, atau kedekatan politik.

Revolving Door

Perpindahan aktor antara jabatan publik dan sektor swasta yang dapat menimbulkan risiko konflik kepentingan.

State Capacity

Kemampuan negara untuk merancang, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan secara efektif.

Teknokrat

Pejabat atau ahli yang memiliki kompetensi teknis dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

Tata Kelola

Sistem aturan, prosedur, nilai, pengawasan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga atau kebijakan.

Daftar Pustaka

Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). The colonial origins of comparative development: An empirical investigation. *American Economic Review*, 91(5), 1369–1401. DOI: 10.1257/aer.91.5.1369

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2008). Persistence of power, elites, and institutions. *American Economic Review*, 98(1), 267–293. DOI: 10.1257/aer.98.1.267

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown Business.

Bardhan, P. (1997). Corruption and development: A review of issues. *Journal of Economic Literature*, 35(3), 1320–1346.

Buchanan, J. M., & Tullock, G. (1962). *The calculus of consent: Logical foundations of constitutional democracy*. University of Michigan Press.

Fukuyama, F. (2013). What is governance? *Governance*, 26(3), 347–368. DOI: 10.1111/gove.12035

Gilens, M., & Page, B. I. (2014). Testing theories of American politics: Elites, interest groups, and average citizens. *Perspectives on Politics*, 12(3), 564–581. DOI: 10.1017/S1537592714001595

Grossman, G. M., & Helpman, E. (1994). Protection for sale. *American Economic Review*, 84(4), 833–850.

Grossman, G. M., & Helpman, E. (1992). *Protection for sale* (NBER Working Paper No. 4149). National Bureau of Economic Research. DOI: 10.3386/w4149

Khan, M. H. (2010). Political settlements and the governance of growth-enhancing institutions. *SOAS Working Paper*.

North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.

North, D. C., Wallis, J. J., & Weingast, B. R. (2009). *Violence and social orders: A conceptual framework for interpreting recorded human history*. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511575839

OECD. (2017). *Preventing policy capture: Integrity in public decision making*. OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264065239-en

OECD. (2026). *Anti-corruption and integrity outlook 2026: Indonesia*. OECD Publishing.

OECD. (2026). *OECD economic outlook, volume 2026 issue 1: Indonesia*. OECD Publishing.

Peltzman, S. (1976). Toward a more general theory of regulation. *Journal of Law and Economics*, 19(2), 211–240. DOI: 10.1086/466865

Rodrik, D. (2007). *One economics, many recipes: Globalization, institutions, and economic growth*. Princeton University Press.

Rodrik, D., Subramanian, A., & Trebbi, F. (2004). Institutions rule: The primacy of institutions over geography and integration in economic development. *Journal of Economic Growth*, 9(2), 131–165. DOI: 10.1023/B:JOEG.0000031425.72248.85

Stigler, G. J. (1971). The theory of economic regulation. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 2(1), 3–21.

Transparency International. (2026). *Corruption Perceptions Index 2025: Indonesia country profile*.

World Bank. (2026). *Indonesia economic prospects: Managing risks, unlocking productivity*. World Bank.

World Bank. (2026). *Global economic prospects*. World Bank.

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 21 June 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](https://chatgpt.com/c/6a388ad7-46fc-83ec-b5c6-bc3ad53631f7)). <https://chatgpt.com/c/6a388ad7-46fc-83ec-b5c6-bc3ad53631f7>